



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan



Rencana Strategis PSKP 2022-2024

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan



Copyright
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Penyusun
Tim Analis Sekretaris Jenderal

Didukung oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Kompleks Kemdikbud-Ristek, Gedung E Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270
Telp. 021 - 5713827
puslitjakbud@kemdikbud.go.id



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Rencana Strategis PSKP 2022-2024

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan





KATA PENGANTAR

“Rencana-rencana itu tidak penting, yang penting adalah perencanaan.” – Eisenhower

Begitulah cerita dari Eisenhower, salah satu pemimpin militer Amerika Serikat yang juga menjadi Presiden AS. Secara prinsip, proses dalam merencanakan sesuatu sangat berpengaruh dalam menentukan kesuksesan suatu kegiatan, tanpa terkecuali dalam membangun Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP).

Perencanaan yang kita susun perlu mempertimbangkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Bagaimana pun dan sedetail apa pun rencana yang kita susun, perubahan dan dinamika tantangan pasti kita hadapi. Dalam memastikan PSKP bergerak secara efektif, PSKP perlu mengantisipasi hal-hal yang mungkin dihadapi di masa depan.

Di masa depan, PSKP akan memiliki peran lebih besar dalam mendukung penyusunan kebijakan pendidikan, khususnya di Kemendikbudristek. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan kapasitas lembaga agar mampu mengemban tanggung jawab yang lebih besar nanti.

Dalam menyusun rencana, kita tentu mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Meski demikian, jika nanti ada perubahan yang tidak kita duga sebelumnya, PSKP harus mampu beradaptasi dan memastikan peran dan kontribusinya terwujud dengan baik.

Rencana strategis ini adalah bagian dari upaya PSKP dalam melihat, menakar, dan melangkah ke depan. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa merahmati dan memudahkan jalan bagi kita untuk turut mencerdaskan bangsa.

Jakarta, 1 Juli 2022

Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan,
Irsyad Zamjani, Ph.D



KEMEN
BAD
DIDIKAS
R, KU
ANDAR
N, RISET, DAN
ASESMEN PEND
KAN PENDIDIK



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	4
Tugas dan Fungsi PSKP	5
Struktur Organisasi PSKP	6
BAB II VISI, MISI, DAN STRATEGI	
Visi PSKP	10
Misi PSKP	10
1. Misi Pertama: Menyusun standar pendidikan yang relevan dengan penyempurnaan berkelanjutan	12
2. Misi Kedua: Mendukung kebijakan pendidikan yang strategis dan berdampak sistemis	12
Strategi Kegiatan 1: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan	12
Strategi Kegiatan 2: Evaluasi Cepat Kebijakan Pendidikan	13
Strategi Kegiatan 3: Evaluasi Kebijakan Pendidikan	13
Strategi Kegiatan 4: Dukungan Fasilitasi Kebijakan Pendidikan	13
Strategi Kegiatan 5: Pengelolaan Kolaborasi Studi Kebijakan	14
3. Misi Ketiga: Mengembangkan kapasitas lembaga untuk tumbuh dan berkolaborasi	14
BAB III TARGET KINERJA	
Sasaran Strategis yang diampu oleh PSKP	20
Sasaran Strategis (SS)	20
Target Kinerja	22
Sasaran Kegiatan (SK)	22
BAB IV PENUTUP	26





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ibarat sebuah perjalanan panjang, persiapan logistik dan perencanaan merupakan hal yang esensial. Pada prosesnya, begitu banyak hal yang perlu diantisipasi dan perlu persiapan-persiapan tertentu. Meski demikian, banyak hal di luar rencana yang nantinya akan terjadi dan mau tidak mau, kita harus siap menghadapinya. Oleh karena itu, proses perencanaannya merupakan komponen yang jauh penting daripada rencana-rencana itu sendiri. Proses perencanaan tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran ke arah mana kita akan berjalan dan tantangan apa yang akan dihadapi. Setelah sampai pada tujuan, kita akan melihat kembali pengalaman perjalanan untuk memastikan perjalanan berikutnya akan lebih lancar dan lebih baik, terutama jika akan dilakukan untuk jarak tempuh yang lebih jauh lagi.

Aspek-aspek yang meliputi proses penyusunan standar dan kebijakan kurang lebih sama dengan proses perencanaan perjalanan. Kita perlu melakukan perencanaan kebijakan pendidikan dengan baik untuk memastikan standar dan kebijakan yang disusun diimplementasikan dan berdampak. Proses tersebut memerlukan data, temuan, dan informasi yang relevan dan sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, PSKP perlu mengambil peran sebagai pusat kajian kebijakan pendidikan yang melakukan dan mengelola kajian-kajian pendidikan yang dilakukan sendiri, dalam bentuk kerja sama, atau pun yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak lain.

Pada proses implementasi kebijakan, dukungan pada tingkat pusat dan daerah juga diperlukan. Perlu adanya pemahaman yang utuh atas kebijakan yang disusun. Sebelum melangkah lebih jauh dalam kolaborasi, masing-masing unit yang melaksanakan kebijakan perlu memahami latar belakang, kerangka kebijakan, serta dampak yang

diharapkan. Oleh karena itu, PSKP perlu mengambil peran fasilitator dalam membantu pusat dan daerah meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan. Sebagai fasilitator, PSKP nantinya menjadi mitra pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam melakukan penyusunan kebijakan pendidikan.

Dalam melakukan tugas-tugasnya, PSKP perlu memastikan untuk terus memiliki dan memperbesar ruang geraknya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan mengatur ulang pola kerja internal. Selain itu, PSKP juga perlu memanfaatkan potensi-potensi kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain dalam memastikan penyusunan kebijakan pendidikan yang berkualitas.

2. Tugas dan Fungsi PSKP

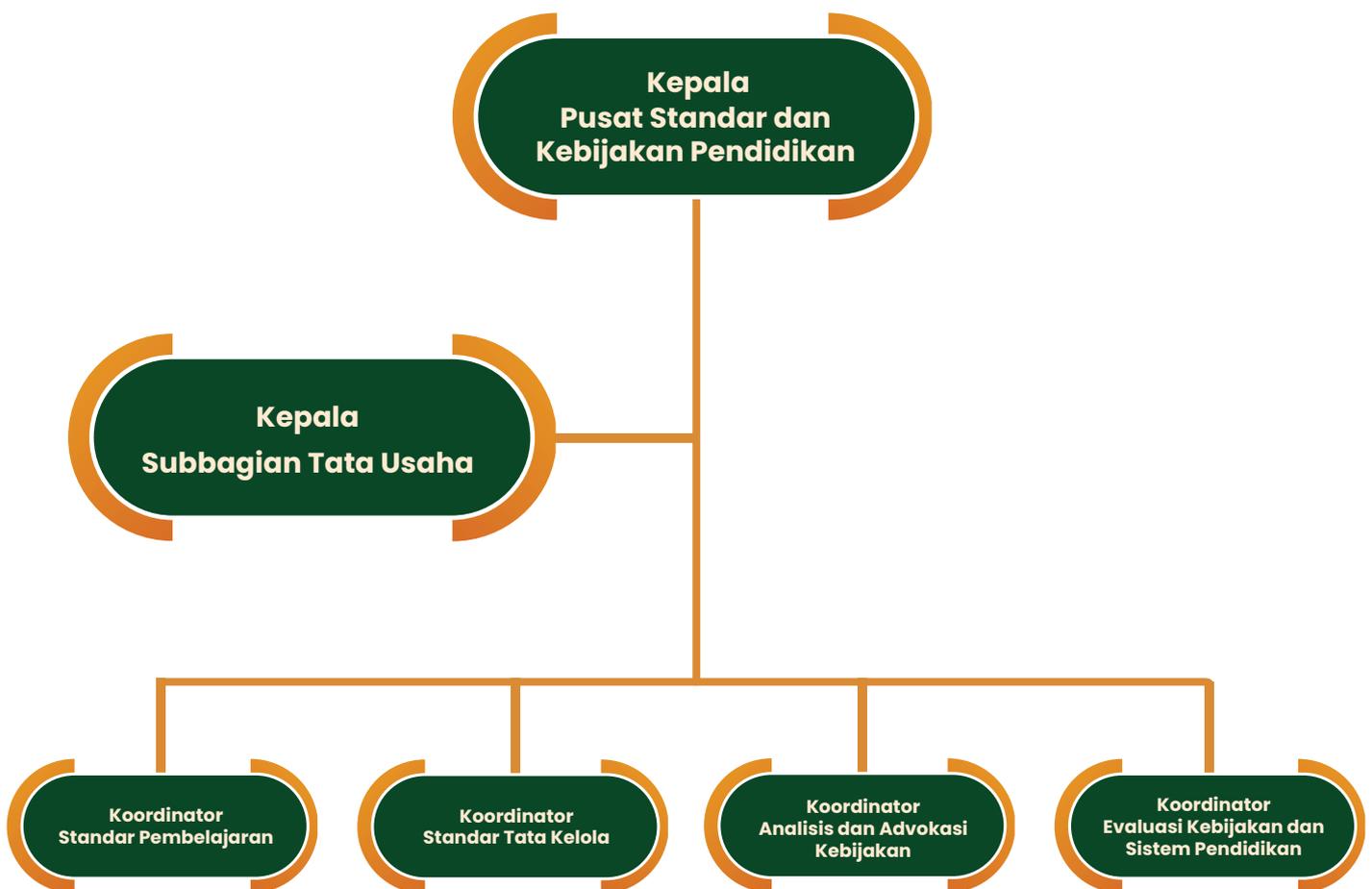
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek pasal 243, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan memiliki tugas melaksanakan penyiapan kebijakan standar, penyusunan standar, dan analisis kebijakan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PSKP menyelenggarakan fungsi:

- A. Penyiapan kebijakan di bidang standar pendidikan;
- B. Pelaksanaan penyusunan standar di bidang pendidikan;
- C. Pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan;
- D. Koordinasi dan fasilitasi di bidang standar dan kebijakan pendidikan;
- E. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standar dan kebijakan pendidikan; dan
- F. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

3. Struktur Organisasi PSKP

Dalam mendukung ketercapaian Tugas dan Fungsi PSKP sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek serta penyederhanaan Birokrasi Pemerintah maka susunan struktur organisasi PSKP adalah sebagai berikut:



PSKP sebagai unit Eselon II di bawah BSKP dipimpin oleh Kepala Pusat dengan Subbagian Tata Usaha serta kelompok kerja yang berisi kelompok jabatan fungsional di bawahnya.







BAB II
VISI, MISI, DAN STRATEGI



BAB II

VISI, MISI, DAN STRATEGI

1. Visi PSKP

“Menuju implementasi standar dan kebijakan pendidikan yang relevan, berkualitas, dan berkembang.”

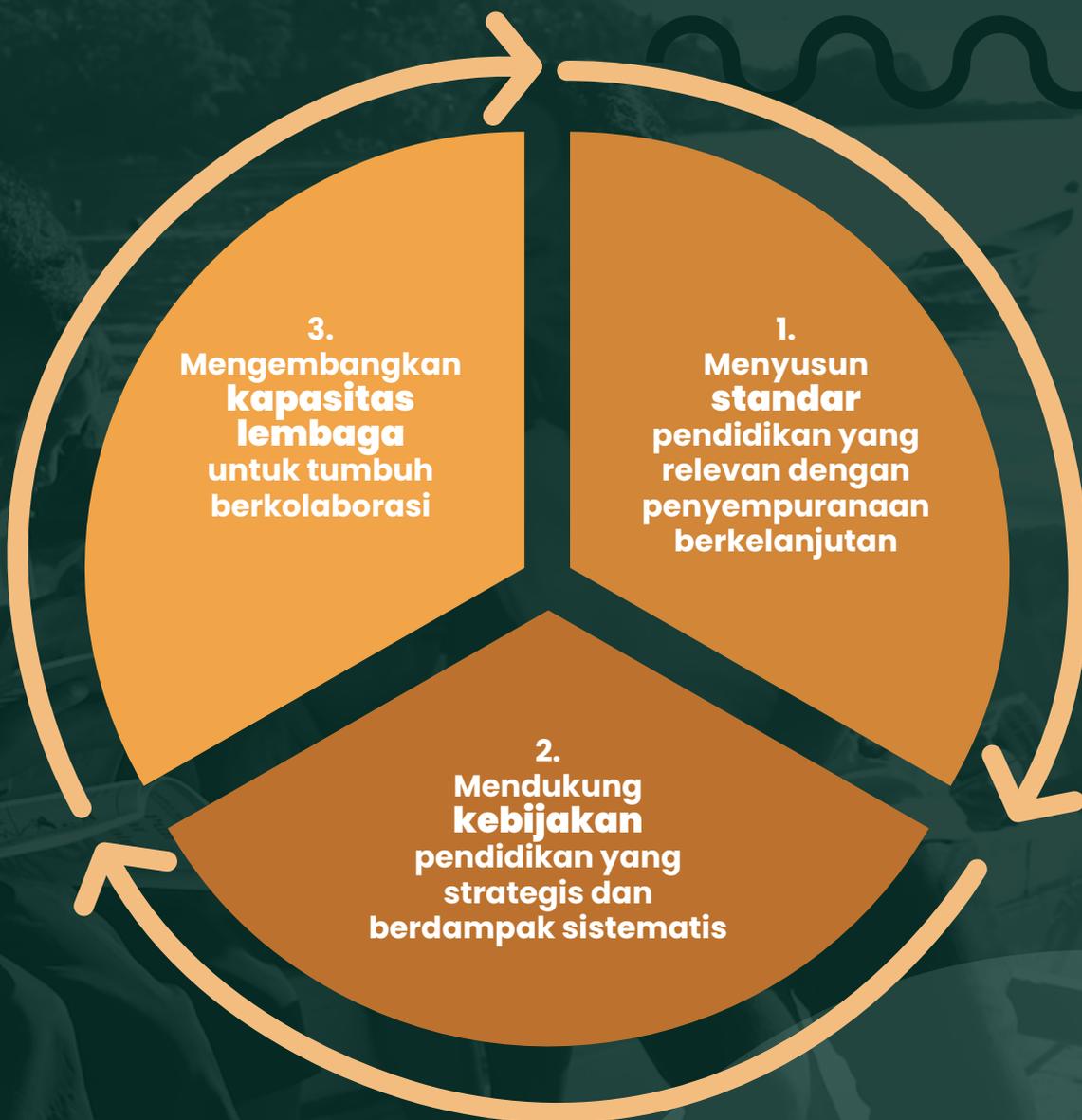
Makna dari visi PSKP:

Sebagai sebuah unit kerja strategis, PSKP diharapkan dapat berperan dalam mendukung implementasi standar dan kebijakan pendidikan pada tahapan penyusunan dan evaluasi kebijakan. Dengan dukungan-dukungan tersebut, unit-unit kerja yang terlibat dalam menyusun kebijakan pendidikan diharapkan dapat makin kapabel dalam membuat kebijakan pendidikan relevan, berkualitas, dan berkembang.

Relevan artinya kebijakan yang disusun sesuai dengan prioritas masalah dan kebutuhan yang dihadapi, baik di pusat maupun daerah. Berkualitas artinya kebijakan pendidikan yang disusun tidak hanya sebatas administrasi tetapi juga berbobot dan berdampak pada peningkatan indikator-indikator pendidikan. Berkembang artinya kebijakan yang disusun dievaluasi dengan baik dan hasil evaluasinya benar-benar digunakan untuk perbaikan kebijakan.

2. Misi PSKP

Dalam mencapai visinya, PSKP memiliki tiga misi utama yang dapat dilakukan pada 5 (lima) tahun ke depan.



Ketiga misi ini merupakan satu kesatuan yang diturunkan secara langsung dari tugas dan fungsi PSKP serta visi PSKP.

Sumber: Dok. BKHM Kemendikbud

#1

Misi Pertama: Menyusun standar pendidikan yang relevan dengan penyempurnaan berkelanjutan

Standar pendidikan yang relevan perlu disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan penyempurnaan dari standar yang sudah ada. Dalam melakukan proses tersebut, PSKP perlu menyusun alur pengembangan standar pendidikan dengan rapi. Alur penyempurnaan tersebut, sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun 2021, perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pada prosesnya, penyempurnaan tersebut harus mempertimbangkan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Oleh karena itu, PSKP berkomitmen untuk menyusun alur rencana penyempurnaan pada standar-standar pendidikan yang nantinya akan dilakukan pada 5 (lima) tahun ke depan, dari 2023 sampai 2027.

#2

Misi Kedua: Mendukung kebijakan pendidikan yang strategis dan berdampak sistemis

Kebijakan pendidikan perlu disusun dengan dukungan data, temuan, dan pertimbangan lain yang relevan. Oleh karena itu, PSKP perlu mendukung penyusunan kebijakan pendidikan melalui beberapa rumpun kegiatan.

Strategi Kegiatan 1: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan

Kajian strategis adalah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh PSKP dalam mempersiapkan dan mendukung proses penyusunan kebijakan pendidikan strategis pada tingkat nasional. Pada kegiatan ini, PSKP mengumpulkan data-data secara umum untuk memetakan permasalahan pendidikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, PSKP akan menyusun prioritas-prioritas masalah dan mencari solusi yang relevan, baik yang diformulasikan sendiri

maupun yang diadaptasi dari praktik di tempat lain.

Hasil studi strategis dapat digunakan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan di bidang pendidikan oleh PSKP maupun unit lain di Kemendikbudristek. Dalam hal ini, PSKP berperan dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan agar tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang diinginkan.

Strategi Kegiatan 2: Evaluasi Cepat Kebijakan Pendidikan

Evaluasi cepat dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk menunjukkan dampak awal dari implementasi suatu kebijakan. Evaluasi cepat memiliki siklus, cakupan, dan metode yang lebih sederhana dari evaluasi dampak pada umumnya. Pengambil kebijakan dapat melihat sinyal awal implementasi kebijakan untuk menjadi dasar dalam memutuskan tindak lanjut pada kebijakan terkait.

Strategi Kegiatan 3: Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan rangkaian kajian kebijakan pendidikan yang menyeluruh yang mengobservasi tidak hanya segi luaran dan hasil, tetapi juga dampak yang lebih luas. Evaluasi kebijakan pendidikan umumnya dilakukan dalam beberapa tahun agar secara utuh memberikan data dan informasi bagaimana proses kebijakan tersebut diimplementasikan pada tahap awal hingga berdampak.

Strategi Kegiatan 4: Dukungan Fasilitasi Kebijakan Pendidikan

Proses penyusunan kebijakan pendidikan merupakan beban pekerjaan yang relatif besar. Karena besarnya beban dan begitu penting hasilnya, PSKP perlu mengambil peran fasilitasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyusunan kebijakan pendidikan yang sebatas administrasi saja. Selain itu, PSKP juga dapat memberikan masukan-masukan agar kebijakan pendidikan, baik di pusat maupun daerah, selaras dan saling melengkapi.

Bentuk dukungan kebijakan yang dapat dilakukan PSKP antara lain terlibat sebagai fasilitator dalam diskusi-diskusi kebijakan, menyediakan informasi dan pertimbangan yang relevan, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpeluang mengatasi masalah-masalah prioritas yang ada di tingkat pusat dan spesifik di daerah.

Strategi Kegiatan 5: Pengelolaan Kolaborasi Studi Kebijakan

Perlu disadari bahwa PSKP bukanlah satu-satunya unit kerja yang melakukan kajian kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, PSKP perlu mengambil peran sebagai pengelola studi (research manager) yang dapat memetakan pihak mana saja yang melakukan kajian kebijakan apa saja. Jika dirasa perlu, PSKP pun dapat menjadi jembatan kolaborasi antar pihak yang melakukan kajian kebijakan. Selain itu, PSKP juga dapat menjadi wadah yang melakukan kurasi kajian kebijakan pendidikan dan meneruskannya kepada unit-unit kerja terkait di Kemendikbudristek sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

#3

Misi Ketiga: Mengembangkan kapasitas lembaga untuk tumbuh dan berkolaborasi

Dalam melaksanakan dua strategi sebelumnya, PSKP perlu memastikan adanya ruang perubahan untuk tumbuh dan berkolaborasi. Oleh karena itu, sebagai unit kerja yang hasil pekerjaannya bertumpu pada produktivitas sumber daya manusia, PSKP juga perlu memasukkan agenda pengembangan lembaga sebagai strategi utama.

Ada dua komponen yang penting PSKP perhatikan dalam meningkatkan kapasitas lembaga. Pertama, PSKP perlu meningkatkan kualitas SDM dan pola kerja agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Kedua, mengingat pemangku kepentingan PSKP ada di pusat dan daerah, PSKP juga perlu meningkatkan kapasitas untuk menampilkan diri dan berkomunikasi ke luar, termasuk kepada publik.

Ringkasan Rencana Tahunan

Tahun	Rencana Tahunan
2023	<p>Standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun standar-standar yang belum ada. 2. Fasilitasi dan sosialisasi standar yang sudah ada. 3. Melakukan evaluasi untuk penyempurnaan standar. <p>Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian strategis kebijakan pendidikan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Kemendikbudristek 2024-2029. 2. Melakukan evaluasi cepat pada kebijakan-kebijakan yang memasuki fase pilot dan/atau pengembangan. 3. Melakukan evaluasi dampak pada kebijakan strategis. Kebijakan yang dimaksud akan ditentukan pada tahun berjalan. 4. Menyusun standar-standar yang terkait kebijakan pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Penyusunan Kebijakan Pendidikan b. Standar Fasilitasi Kebijakan Pendidikan <p>Kapasitas Lembaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan kapasitas terkait bidang utama, yakni analisis kebijakan. 2. Melakukan evaluasi pola kerja tim dan menindaklanjuti hasilnya di internal PSKP. 3. Menyusun standar-standar yang digunakan di internal PSKP: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar pengelolaan informasi internal b. Standar pengelolaan pola kerja analis kebijakan

2024	<p>Standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun standar-standar yang belum ada. 2. Fasilitasi dan sosialisasi standar yang sudah ada. 3. Melakukan evaluasi untuk penyempurnaan standar. <p>Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi dampak pada kebijakan strategis. Kebijakan yang dimaksud akan ditentukan pada tahun berjalan. 2. Melakukan evaluasi cepat pada kebijakan-kebijakan yang memasuki fase pilot dan/atau pengembangan. 3. Menemukan cara yang sesuai untuk memberikan dukungan fasilitasi kebijakan. 4. Mulai mengambil peran sebagai <i>research manager</i> untuk kajian-kajian kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh selain PSKP.
	<p>Kapasitas Lembaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneruskan pengembangan kapasitas terkait bidang utama (i.e., analisis kebijakan) 2. Uji coba kerjasama yang melibatkan analisis kebijakan non-PSKP untuk melakukan kajian kebijakan di PSKP. 3. Melakukan peningkatan kapasitas dalam melakukan diseminasi hasil kajian.
2025	<p>Standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun standar-standar yang belum ada. 2. Fasilitasi dan sosialisasi standar yang sudah ada. 3. Melakukan evaluasi untuk penyempurnaan standar. <p>Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi dampak pada kebijakan strategis. Kebijakan yang dimaksud akan ditentukan pada tahun berjalan. 2. Melakukan evaluasi cepat pada kebijakan-kebijakan yang memasuki fase pilot dan/atau pengembangan. 3. Melakukan internalisasi alternatif dukungan fasilitasi kebijakan yang efektif ke dalam sistem PSKP. 4. Meningkatkan kapasitas dalam berperan sebagai <i>research manager</i> untuk kajian-kajian kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh selain PSKP. <p>Kapasitas Lembaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneruskan pengembangan kapasitas terkait bidang utama (i.e., analisis kebijakan) 2. Melakukan peningkatan kapasitas dalam melakukan diseminasi hasil kajian.







BAB III

TARGET KINERJA

BAB III

TARGET KINERJA

1. Sasaran Strategis yang diampu oleh PSKP

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan sebagai unit Eselon II dibawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I di atasnya. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan maka disusun sejumlah strategi yang akan dicapai pada tahun 2020 - 2024. Strategi-strategi ini disusun sesuai dengan kebijakan utama di Kemendikbudristek yang turut mendukung terwujudnya visi presiden.

Sasaran Strategis (SS)

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan sebagai unit Eselon II dibawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I di atasnya. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan maka disusun sejumlah strategi yang akan dicapai pada tahun 2020 - 2024. Strategi-strategi ini disusun sesuai dengan kebijakan utama di Kemendikbudristek yang turut mendukung terwujudnya visi presiden.

(SS 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang

IKSS 2.2

Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum

2020 (Baseline)	2022	2023	2024
A. Literasi			
43,00	47,50	49,75	52,00
B. Numerasi			
22,90	28,30	29,20	30,10

(SS 5) Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS 5.3

Predikat SAKIP Kemendikbudristek

2020 (Baseline)	2022	2023	2024
BB	BB	A	A
43,00	47,50	49,75	52,00

IKSS 5.4

Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

2020 (Baseline)	2022	2023	2024
78	83	85	87

Untuk mencapai Sasaran Strategis diatas, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan memiliki Sasaran Program (SP) Meningkatnya mutu pendidikan melalui penjaminan mutu pendidikan dengan Indikator kesuksesan yang diampu Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan sebagai berikut:

IKSS 2.2.9

Persentase rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis

2020 (Baseline)	2022	2023	2024
22,22	57	65	74

Target Kinerja

Keberhasilan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi-nya dapat diukur melalui pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) yang diampu oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan sebagai Unit Eselon II dibawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Pencapaian Sasaran Kegiatan dijabarkan melalui pemenuhan dan/atau capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

Sasaran Kegiatan (SK)

Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

IKK 2.2.9.1

Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan

2020 (Baseline)	2022	2023	2024
54	13	13	13
43,00	47,50	49,75	52,00

IKK 2.2.9.2

Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan

2020 (Baseline)	2022	2023	2024
-	10	10	10





KEMEN
BAD
DIDIKAS
R, RISET, DAN
AR, KULIAH, ASESMEN PEND
ANDAR KE KAN PENDIDIK





BAB IV

PENUTUP

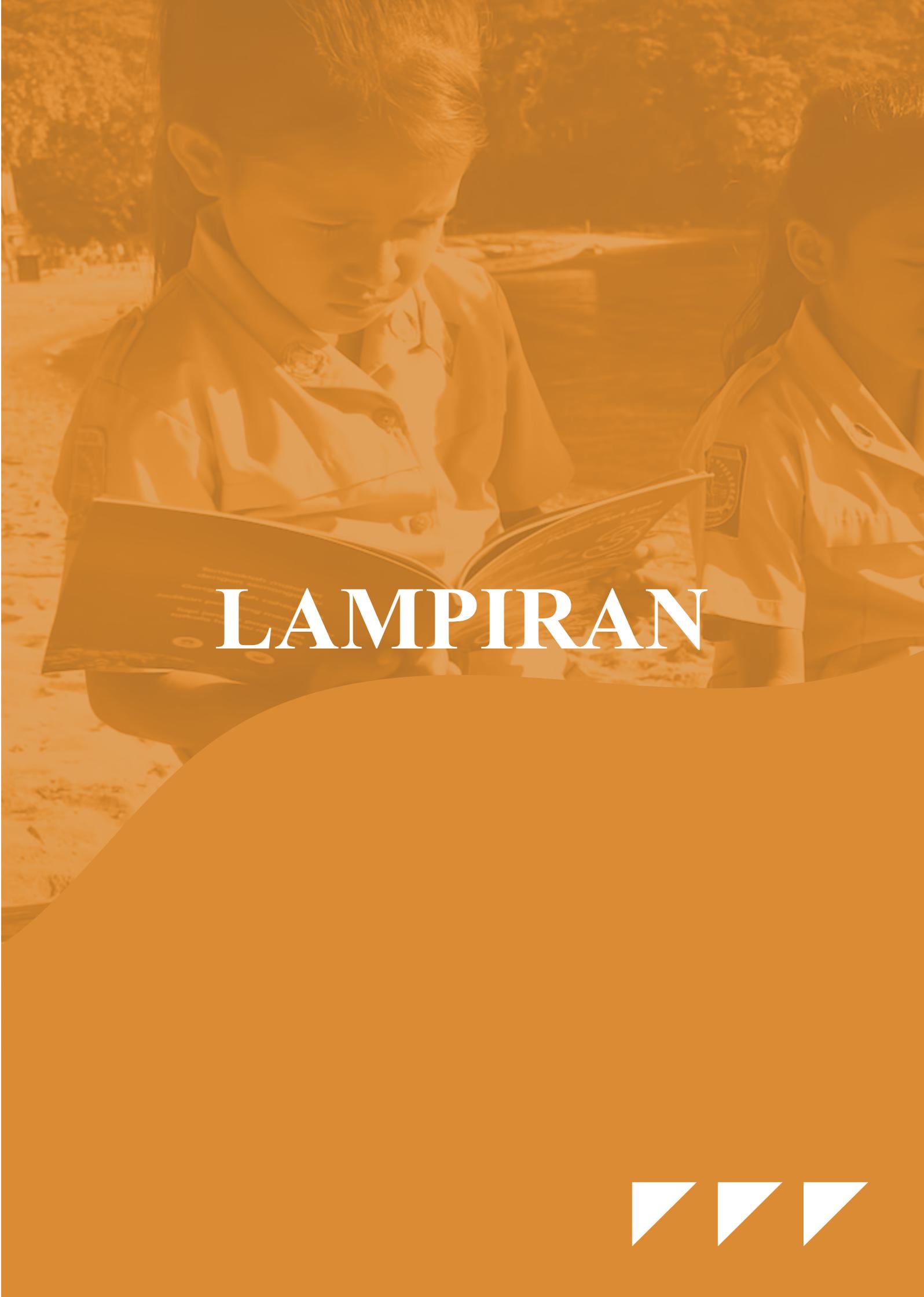


BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis ini disusun sebagai gambaran umum arah pengembangan kelembagaan dan program Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Adapun aspek-aspek yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi dapat dilakukan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Visi, misi, program, bahkan praktik untuk memenuhi target-target lembaga dapat selalu disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan sejauh mana relevansi dan keterlaksanaan program.

A photograph of two young children in school uniforms sitting on a sandy beach. The child on the left is holding an open book and looking down at it. The child on the right is also looking at the book. The background shows a calm body of water and some trees in the distance. The entire image is overlaid with a semi-transparent orange filter. A large, curved orange shape is at the bottom of the page.

LAMPIRAN



Tabel Kerangka Pendanaan PSKP

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline		Target		Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2022	2023	2024	2022	2023		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang										
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum	%	43,00	47,50	49,75	52,00					Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
	a. Literasi	%	22,90	28,30	29,20	30,10					
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel										
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	BB	A	A					Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	83	85	87					Surat Menteri PANRB tentang hasil PMPRB Kemendikbud
SP	Meningkatnya mutu pendidikan melalui penjaminan mutu pendidikan										
IKP 2.2.8	Persentase rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis	%	22	57	65	74	31.093,30	32.026,09	32.986,88	BSKAP	JDIH, Lap. Evaluasi
6596	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan										
SK	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan										
IKK 2.2.8.1	Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	54	13	13	13	20.537,90	21.154,03	21.788,65	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Laporan Internal
IKK 2.2.8.2	Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	Rekomendasi Kebijakan		10	10	10	10.555,40	10.872,06	11.198,22	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Laporan BSNP

Definisi Operasional Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	:	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan
IKK	:	2.2.9.1. Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan
Definisi:		
Analisis kebijakan Pendidikan merupakan proses melakukan kajian dan/atau analisis terhadap masalah/isu Pendidikan serta evaluasi terhadap kebijakan di bidang Pendidikan yang hasilnya dapat direkomendasikan kepada pengambil kebijakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan.		
Metode Penghitungan:		
Hitung Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan		
Satuan	:	Rekomendasi Kebijakan
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SK : Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

IKK : 2.2.9.1. Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan

Definisi:

Analisis kebijakan Pendidikan merupakan proses melakukan kajian dan/atau analisis terhadap masalah/isu Pendidikan serta evaluasi terhadap kebijakan di bidang Pendidikan yang hasilnya dapat direkomendasikan kepada pengambil kebijakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Metode Penghitungan:

Hitung Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan

Satuan : Rekomendasi Kebijakan

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Sumber Data : Laporan Internal

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode : Tahunan

Pengumpulan Data

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SK : Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

IKK : 2.2.9.2. Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan

Definisi:

Standar di bidang Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai sistem atau komponen tertentu dari sistem Pendidikan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar di bidang Pendidikan dapat berupa Standar Nasional Pendidikan (SNP) maupun Standar di bidang Pendidikan yang lain di luar SNP.

SNP mencakup:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Penilaian Pendidikan;
- e. Standar Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan; dan
- h. Standar Pembiayaan.

Standar di bidang Pendidikan yang lain di luar SNP, antara lain:

- a. Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan;
- b. Standar Pembelajaran Jarak Jauh;
- c. Dan lain-lain.

Rekomendasi standar merupakan hasil pengembangan standar maupun hasil evaluasi terhadap suatu standar yang dapat direkomendasikan kepada pengambil kebijakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Metode Penghitungan:

Hitung Jumlah hasil rekomendasi standar di bidang pendidikan

Satuan	: Rekomendasi Kebijakan
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Sumber Data	: Laporan hasil pengembangan dan /atau evaluasi standar di bidang Pendidikan
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode	: Tahunan
Pengumpulan Data	

